

**DARI MILITER KE PANGGUNG POLITIK:
BIOGRAFI KH. MUHAMMAD MUNASIR ALI TAHUN 1958-1998**

Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si

E-mail: Faridlafuz@gmail.com

Abstract : This article discusses the political and organizational journey of KH. Muhammad Munasir Ali in 1958-1998. This study aims to determine the background that encouraged KH. Muhammad Munasir Ali to enter the political scene and to examine his role in NU and national politics. The results of this study indicate that political knowledge from Islamic boarding school (pesantren) and the bitter experience of Munasir Ali during the Dutch Colonial era were able to shape his character. His courage and leadership were increasingly formed when he became the Commander of the Hezbollah Battalion Condromowo. After retiring from the military, Munasir Ali became interested in political struggle, which then pushed him to enter the political stage. His political career began in 1958, he was withdrawn as a member of the National Council from the group of former armed fighters and the National Development Planning Board representative of veterans in 1959. In addition, Munasir Ali was also active as the First Executive Board. His political career improved, when Munasir Ali was withdrawn to become an additional member of the DPRGR in Pertanu in 1967. He worked in the DPR for twenty years until 1987, namely several times as Deputy Chair of the Commission, even as Chair of Commission 8 and Deputy Chair of the Faction in 1982. Then he also became Chairman 1 and one of the figures who formed HKTI in 1973. Munasir Ali was also active in PBNU by becoming Secretary General of PBNU 1979, Mustasyar 1984, Rois syuriah 1989, and Mustasyar 1994. Then finally he was one of the PKB declarators in 1998.

Keywords: Muhammad Munasir Ali, Commander, Politics, Declarator.

Abstrak : Artikel ini membahas tentang perjalanan politik dan organisasi KH. Muhammad Munasir Ali tahun 1958-1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang mendorong KH. Muhammad Munasir Ali terjun ke panggung politik dan mengetahui perannya dalam NU dan politik nasional. Hasil penelitian ini

*Dari Militer ke Panggung Politik:
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998
(Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)*

menunjukkan bahwa pengetahuan politik dari pesantren ditambah pengalaman pahit Munasir Ali pada jaman Kolonial Belanda mampu membentuk karakternya. Sikap keberanian dan kepemimpinannya semakin terbentuk ketika menjadi Komandan Batalyon Hizbullah Condromowo. Pasca pensiun dari militer, Munasir Ali tertarik dalam perjuangan politik, yang kemudian mendorongnya terjun dalam panggung politik. Karir politiknya dimulai tahun 1958, ia ditarik menjadi anggota Dewan Nasional dari golongan bekas pejuang bersenjata dan Dewan Perancang Pembangunan Nasional perwakilan veteran tahun 1959. Selain itu, Munasir Ali juga aktif sebagai Pengurus Besar Pertanu. Karir politiknya meningkat, ketika Munasir Ali ditarik menjadi anggota DPRGR tambahan perwakilan Pertanu tahun 1967. Kiprahnya di DPR selama dua puluh tahun sampai tahun 1987 yaitu beberapa kali menjadi Wakil Ketua Komisi, bahkan menjadi Ketua Komisi 8 dan Wakil Ketua Fraksi tahun 1982. Kemudian ia juga menjadi Ketua 1 sekaligus salah satu tokoh yang membentuk HKTI tahun 1973. Munasir Ali juga aktif di PBNU dengan menjadi Sekretaris Jenderal PBNU 1979, Mustasyar 1984, Rois syuriah 1989, dan Mustasyar 1994. Kemudian terakhir ia menjadi salah satu deklarator PKB tahun 1998.

Kata kunci: Muhammad Munasir Ali, Komandan, Politik, Deklarator

1. Pendahuluan

Kedatangan Jepang di Hindia Belanda dimulai ketika Angkatan Darat ke-16 Jepang menaklukkan pemerintahan Hindia Belanda pada 8 Maret 1942, setelah operasi militer selama seminggu. Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang atas Hindia Belanda yang diperkuat dalam Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Kekalahan Belanda atas Jepang menyebabkan wilayah Hindia Belanda berada di bawah pendudukan Jepang (Siti Sumardi, 2010: 19). Pada umumnya masyarakat Hindia Belanda menerima dengan tangan terbuka dan penuh semangat kedatangan Jepang di Hindia Belanda, bahkan Jepang tidak mendapat tantangan apapun dari kaum nasionalis dan masyarakat Hindia Belanda pada umumnya. Bagi masyarakat Hindia Belanda, kedatangan Jepang merupakan bentuk dukungan dan bantuan dalam memerdekakan diri dari Kolonial Belanda, artinya kedatangan Jepang akan membebaskan masyarakat Hindia Belanda dari belenggu penjajahan Pemerintahan Kolonial Belanda.

Semangat masyarakat Hindia Belanda seketika menurun ketika Pemerintah militer Jepang mulai mengembangkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan melakukan eksploitasi ekonomi secara intensif dan mengendalikan secara ketat kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Khususnya kondisi Jawa, semakin memburuk selama akhir masa pendudukan Jepang. Kondisi ini dikarenakan Pemerintah Pendudukan Jepang selalu membebani rakyat dengan berbagai kebijakan dan kewajiban untuk menyediakan hasil bumi dan tenaga kerja untuk kebutuhan Perang Asia Timur Raya. Di sisi lain, Pemerintah Pendudukan Jepang mengabaikan sarana dan prasarana fisik, sehingga ketimpangan ekonomi, sosial serta lingkungan semakin menambah penderitaan rakyat. Penerapan kebijakan kerja rodi bagi masyarakat Hindia Belanda semakin memperburuk keadaan masyarakat Hindia Belanda.

Kebijakan yang dilakukan selain mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber alam, Pemerintah Pendudukan Jepang juga berusaha melakukan propaganda politik dan mobilisasi massa, khususnya kepada Islam dalam rangka mempengaruhi pikiran rakyat. Pemerintah Pendudukan Jepang memandang agama sebagai alat penting untuk memanipulasi pikiran rakyat. Mereka mulai melakukan indoktrinasi terhadap tokoh-tokoh Islam agar rakyat dapat mengikuti keinginan Pemerintah Pendudukan Jepang. Setidaknya ada tiga kebijakan yang dilakukan Jepang untuk memanfaatkan tokoh-tokoh Islam dalam menjalankan propaganda dan mobilisasi massa, yaitu

*Dari Militer ke Panggung Politik:
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998
(Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)*

mendirikan organisasi Masyumi, membentuk seksi urusan keagamaan (*shumuka*) di setiap pemerintahan keresidenan, dan latihan alim ulama (Aiko Kurasawa, 1993: 275).

Propaganda politik dan mobilisasi massa berlanjut pada tahun 1943 ketika Pemerintah Pendudukan Jepang membentuk organisasi-organisasi sosial politik berbasis kepemudaan yang menjadi target Pemerintah Pendudukan Jepang adalah masyarakat bawah dan pemuda. Pemerintah Pendudukan Jepang menyadari bahwa pemuda memiliki potensial untuk dimobilisasi sebagai pasukan perang Jepang. Kemudian Pemerintah Pendudukan Jepang juga membentuk organisasi pemuda bersifat militeristik. Salah satunya adalah membentuk tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) pada 3 Oktober 1943. Anggotanya mencapai 37.000 orang di Jawa, 1.600 di Bali, dan sekitar 20.000 di Sumatra. Kemudian Pemerintah Pendudukan Jepang melalui Abdul Hamid Ono, meminta kepada Wahid Hasyim untuk mengerahkan para pemuda santri masuk ke dalam Heiho sebagai tenaga serdadu cadangan untuk melawan Sekutu, namun Wahid Hasyim menolak. Kemudian Wahid Hasyim mengusulkan agar para santri diberi latihan kemiliteran dengan nama Hizbullah untuk mempertahankan dalam negeri, karena mempertahankan tanah air akan lebih menggugah semangat para santri daripada bertempur di luar tanah air. Hizbullah berdiri secara resmi pada 14 Oktober 1944 (Hasyim Latif, 1995: 17)

Muhammad Munasir Ali merupakan salah satu tokoh Hizbullah yang turut memperjuangkan kemerdekaan RI di Jawa Timur sebagai komandan batalyon. Keterlibatannya dalam pertempuran melawan Jepang maupun Belanda bermula ketika ikut latihan militer dalam Heiho, kemudian Munasir Ali bergabung dengan Hizbullah. Perannya yang cukup penting sebagai Wakil Komandan Hizbullah Mojokerto, membuat ia disegani banyak orang termasuk para prajurit Hizbullah. Kemudian Hizbullah Mojokerto membentuk dua batalyon, batalyon pertama dipimpin oleh Mansur Solikhi dan batalyon kedua dipimpin oleh Munasir Ali. Ketika Surabaya diserang oleh pasukan Inggris dan Belanda, Munasir Ali sebagai komandan batalyon menggerakkan pasukannya untuk menyerang pasukan Inggris dan Belanda di Surabaya. Kemudian ia juga menjadi pengatur siasat perang ketika Belanda menyerang daerah Pacet dan sekitarnya. Begitu juga ketika Belanda menyerang daerah Jombang dan sekitarnya. Munasir Ali memiliki pribadi yang berani dalam menghadapi segala hal, tegar, dan tenang. Semua itu tidak dimiliki secara instan, melainkan ditempa melalui liku-liku pengalaman hidupnya.

Pada waktu Agresi Belanda II tahun 1947, Mojokerto dan daerah-daerah di Jawa Timur dikuasai kembali oleh Belanda. Dalam periode ini terjadi gencatan senjata dan semua kesatuan bersenjata disatukan dalam satu wadah yang disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga dari berbagai kelaskaran menggabungkan diri ke TNI termasuk Munasir Ali dan pasukannya yang ikut bergabung di dalamnya. Pada waktu Mojokerto dikuasai Belanda, Munasir Ali sebagai Komando Batalyon membagi pasukannya menjadi dua kompi, yaitu Kompi Muhammad dan Kompi Sakir. Kemudian ia dipercaya sebagai Komandan Batalyon TNI 39 Condromowo, yang kemudian menjadi Batalyon 519 Brawijaya.

Selain menjadi anggota militer, Munasir Ali juga aktif di Pertanu. Kemudian pada tahun 1953, Munasir Ali mengajukan pensiun dari militer untuk fokus di dunia pendidikan dan tertarik dengan perjuangan politik, namun upaya tersebut ditolak oleh Letjend Sudirman pimpinan Munasir Ali di Jawa Timur. Pada tahun 1955, Munasir Ali menjadi juru kampanye partai NU. Pada tahun 1958, Munasir Ali resmi pensiun dari militer dan kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Nasional oleh Pemerintah tahun 1958 dan anggota Dewan Perancang Pembangunan Nasional tahun 1959. Karir politiknya terus meningkat ketika ia ditarik menjadi anggota DPR GR tambahan tahun 1967, yang kemudian mengantarkannya berkiprah dalam Parlemen sampai tahun 1987. Selain itu, Munasir Ali juga Aktif di Organisasi NU, berawal dari pengurus besar Pertanu sampai tahun 1973. Berdasarkan hasil Muktamar NU di Semarang tahun 1979, Munasir Ali dipercaya sebagai Sekjen PBNU. kemudian berlanjut berdasarkan hasil Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, Munasir Ali menjadi anggota Mustasyar. Tahun 1989 hasil Muktamar NU di Krapyak Munasir Ali menjadi anggota Rois Syuriah, serta pada Muktamar NU di Cipasung tahun 1994 Munasir Ali sebagai ketua panitia Muktamar tertua sepanjang masa, yang kemudian berdasarkan hasil Muktamar Munasir Ali kembali menjadi anggota Mustasyar PBNU. Terakhir ketika Reformasi tahun 1998, Munasir Ali dipercaya sebagai salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan paparan di atas tulisan ini bermaksud menyoroiti perjalanan dan kiprah politik Muhammad Munasir Ali tahun 1958-1998. Pokok tulisan ini adalah: (1) apa yang mendorong Muhammad Munasir Ali terjun dalam panggung politik?, (2) bagaimanakah peranan Muhammad Munasir Ali dalam NU?, (3) bagaimanakah peranan Muhammad Munasir Ali dalam panggung politik nasional?.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian ini adalah: (1) Untuk mengetahui latar belakang yang mendorong Munasir Ali terjun dalam panggung politik, (2) Untuk mengetahui peranan Munasir Ali dalam NU, (3) Untuk mengetahui peranan Munasir Ali dalam panggung politik Nasional.

2. Hasil

2.1 Lingkungan Keluarga dan Karir sebelum politik

Muhammad Munasir Ali lahir pada 2 Maret 1919 di Desa Mojopuro Kecamatan Mojasari, Mojokerto. Ia mengenyam pendidikan di sekolah Belanda yaitu *HIS*, dan ketika akan melanjutkan masuk *MULO* orang tuanya tidak mengizinkan, karena orang tuanya menginginkan melanjutkan ke pesantren. Kemudian Munasir Ali melanjutkan ke pondok pesantren dan beberapa kali pindah pondok pesantren. Selama di pesantren, Munasir Ali tidak hanya belajar ilmu agama, namun ia juga belajar tentang politik, ilmu bela diri, dan lainnya. Berangkat dari pesantren bekal hidup perjuangan ia dapatkan, termasuk pengetahuan politik. Kemudian perang kemerdekaan Munasir Ali bergabung dengan Hizbullah, bahkan ia menjadi Komandan Batalyon Condromowo. Ia bersama pasukannya menyerang pasukan Belanda di daerah Pacet dan sekitarnya. Kemudian ia juga ditugaskan untuk menjaga daerah Tuban dan sekitarnya dari serangan pasukan Belanda. Ketika laskar-laskar melebur dalam TNI, Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang menjadi anggota TNI. Ia menjadi komandan Batalyon 39 Condromowo.

2.2 Masa Demokrasi Terpimpin

Muhammad Munasir Ali Pasca pensiun dari militer dengan pangkat mayor tahun 1958, ia diusulkan oleh kabinet dalam sidangnya ke-93 sebagai anggota Dewan Nasional dari golongan bekas pejuang bersenjata dan angkatan darat. Kemudian Dewan Nasional merespon dengan melantiknya pada 14 Agustus 1958 sebagai anggota Dewan Nasional. Selama menjadi anggota Dewan Nasional, Munasir Ali dan anggota Dewan Nasional lainnya banyak memberikan sumbangsih pemikiran berupa nasehat-nasehat kepada pemerintah antara lain perihal pembentukan Dewan Perancang Pembangunan Nasional, dan kebudayaan. Nasehat-nasehat tersebut disampaikan melalui sidang-sidang Dewan Nasional bersama Perdana Menteri dan Presiden.

Kemudian pasca tugas Dewan Nasional berakhir pada Juli 1959, Munasir Ali diusulkan menjadi anggota Dewan Perancang Pembangunan Nasional oleh kabinet karya tahun 1959 perwakilan golongan veteran (Duta Masyarakat, 31 Djuli 1959: 1). Tugas Dewan Perancang Pembangunan Nasional adalah mempersiapkan rancangan Undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraannya serta menyusun rencana pembangunan nasional. Selama menjadi anggota Dewan Perancang Pembangunan Nasional, Munasir Ali aktif dalam rapat-rapat pleno yang membahas acara tunggal yaitu membentuk dasar asasi pembangunan yang berpedoman pada amanat presiden.

Selain berkiprah dalam pemerintahan, pasca pensiun dari militer Munasir Ali juga aktif di Organisasi Pertanu yaitu organisasi di bawah NU yang fokus dalam bidang pertanian. Selama menjadi pengurus Pertanu, Munasir Ali aktif dalam menanggapi isu-isu dan permasalahan pertanian antara lain perihal *landreform*. Pertanu sejak awal mendukung kebijakan *landreform* yang bertujuan untuk menyejahterakan petani dengan cara pengaturan ulang perjanjian bagi hasil dan redistribusi tanah pertanian. Ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965, Munasir Ali menjadi salah satu tokoh penting NU dalam kelompok militan NU yang bertindak melakukan komunikasi dengan militer guna mengamankan situasi dan kondisi (Greg Fealy, 2003: 301). Munasir Ali menjadi salah satu tokoh penghubung antara NU dan militer untuk melawan gerakan-gerakan PKI yang mengancam keamanan bangsa.

2.3 Masa Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru kondisi pemerintahan masih dalam masa transisi sehingga kondisi belum stabil akibat peristiwa 30 September 1965. Dampaknya banyak anggota legislatif dari golongan kiri dibersihkan dari Parlemen, sehingga kuota DPRGR pada waktu itu banyak terjadi kekosongan (Greg Fealy dan Greg Barton, 1997: 41). Kemudian Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang ditarik menjadi anggota DPRGR tambahan perwakilan Pertanu. Munasir Ali menjadi anggota Komisi 2 yang menangani Hankam dan Luar Negeri. Selama menjadi anggota DPRGR Munasir Ali dan anggota lainnya mempunyai tugas untuk merampungkan Undang-Undang Pemilu yang menjadi tolak ukur pelaksanaan Pemilu selanjutnya. Undang-undang tersebut kemudian rampung dengan keluarnya Undang-Undang no 15 tahun 1969 tentang Pemilu yang kemudian menjadi landasan Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971.

Ketika Pemilu 1971, NU menjadi salah satu partai peserta Pemilu yang meraih posisi kedua di bawah Golkar dengan perolehan kursi 25 di DPR. Salah satu tokoh yang masuk menjadi anggota DPR adalah Munasir Ali. Munasir Ali masuk menjadi anggota Komisi 4 dalam bidang Departemen Pertanian, tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi, bahkan kemudian ia menjadi Wakil Ketua Komisi 4 pada tahun 1972. Pada tahun 1973 Pemerintah melakukan kebijakan politik fusi partai yang mendapat perlawanan dari anggota parlemen yang tidak sepakat termasuk Munasir Ali, namun penolakan demi penolakan yang dilakukan tidak berdampak hingga fusi partai tersebut tetap diterapkan. Munasir Ali yang notabene dari NU, melebur dalam Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Pada tahun 1974 Pemerintah mengajukan rancangan Undang-Undang perkawinan kepada DPR, namun rancangan tersebut mendapat pertentangan dari anggota DPR terutama fraksi Persatuan Pembangunan yang menilai beberapa pasal tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Munasir Ali dan anggota fraksi Persatuan Pembangunan menuntut agar rancangan tersebut dilakukan peninjauan kembali guna memperbaiki pasal yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Berdasarkan lobi-lobi panjang perwakilan fraksi persatuan pembangunan, rancangan Undang-Undang tersebut dapat diperbaiki sesuai kesepakatan anggota DPR. Peran lain dalam DPR yang dilakukan Munasir Ali adalah ketika menjadi panitia khusus Repelita 2, yang mana Munasir Ali menjadi perwakilan fraksi Persatuan Pembangunan dalam menyampaikan gagasan Repelita 2. Gagasan yang disampaikan Munasir Ali fokus pada permasalahan desa, yang mana sejauh ini terjadi ketimpangan antara pembangunan di kota dan di desa. Munasir Ali menginginkan adanya keseimbangan dan pemeratan pembangunan baik di kota maupun di desa. Hal itulah yang menjadi salah satu sumbangsih Munasir Ali dalam DPR periode 1971-1977 hingga berakhir masa khidmatnya.

Berakhirnya keanggotan DPR tahun 1977, juga ditandai dengan adanya Pemilu 1977. Hasil Pemilu 1977, Munasir Ali kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan wilayah Jawa Timur. Pada periode ini Munasir Ali masuk dalam komisi 2 bidang Departemen Dalam Negeri, Penyempurnaan Aparatur Negara, Sekretariat Negara, Kantor Urusan Agama, dan Arsip Nasional. Isu hangat yang menjadi masalah dalam DPR tahun 1978 ketika Pemerintah mengusulkan aliran kepercayaan dan P4 dalam sidang MPR. Usulan tersebut menuai penolakan dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang menilai bahwa pengesahan aliran kepercayaan akan memberikan

*Dari Militer ke Panggung Politik:
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998
(Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)*

legitimasi kuat atas kelompok santri dan abangan yang dianggap bagian dari aliran kepercayaan, sehingga ditakutkan akan menimbulkan perpecahan dalam Islam. Sementara P4 dikhawatirkan akan menjadi tafsir yang akan mengaburkan kemurnian Pancasila. Penolakan tersebut kemudian berbuntut pada aksi *Walk out* yang dilakukan anggota fraksi Persatuan Pembangunan termasuk Munasir Ali. Kemudian pada tahun 1980 Munasir Ali menjadi delegasi Konferensi IPU di Berlin Jerman Timur. Ia mewakili fraksi Persatuan Pembangunan dan bertindak sebagai anggota delegasi. Konferensi ini merupakan perkumpulan asosiasi parlemen internasional yang membahas permasalahan internasional secara umum.

Kemudian pada Pemilu 1982, Munasir Ali terpilih kembali dari perwakilan PPP menjadi anggota DPR. Pada periode ini Munasir Ali menjadi Ketua Komisi 8 bidang Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Menteri Negara Urusan Wanita, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Munasir Ali juga menjadi Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Pada periode ini Munasir dan Komisi 8 fokus pada masalah kesehatan dan keluarga berencana.

Munasir Ali juga aktif menjadi pengurus besar Pertanu, yang kemudian melebur dalam HKTI tahun 1973. Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang ikut membentuk HKTI dari Pertanu sekaligus menjadi pengurus sebagai Ketua 1. Kemudian berdasarkan hasil Muktamar di Semarang tahun 1979, Munasir Ali diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Selama menjadi Sekretaris Jenderal PBNU, Munasir Ali melakukan terobosan dalam melakukan tertib administrasi terutama perihal surat menyurat. Ia juga mengatur dan menentukan standarisasi gaji pegawai PBNU guna kesejahteraan pegawai PBNU. Upaya tertib administrasi juga dilakukan Munasir Ali guna mengamankan arsip dan dokumen NU dengan menyerahkan arsip dan dokumen NU kepada badan Arsip Nasional tahun 1979. Hal ini untuk mengamankan aset dan dokumen NU sebagai bagian dari sejarah bangsa.

Kemudian Hasil Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, menghasilkan keputusan NU kembali ke khittah dan asas tunggal Pancasila. Selain itu, hasil Muktamar tersebut menempatkan Munasir Ali menjadi anggota Mustasyar NU yaitu sebagai penasihat syuriah NU. Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang sepakat NU kembali ke khittah karena sejak NU melebur dalam PPP, NU sudah bukan partai politik lagi dan NU juga terlampaui jauh berkutat dengan politik praktis, sehingga luntur nilai organisasi

sosial keagamaannya. Pasca memutuskan kembali ke khittah, NU mulai menerapkan pokok khittah dengan meninggalkan kegiatan politik praktis.

Pada tahun 1989 dilaksanakan Mukhtar NU di Krapyak Yogyakarta. Hasil Mukhtar ini menempatkan Munasir Ali sebagai anggota rois syuriah PBNU. Rois syuriah merupakan badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur NU. Dalam Mukhtar ini juga memutuskan masalah politik yaitu NU memutuskan sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak mempunyai ikatan organisatoris dalam bentuk apapun dengan organisasi atau partai politik. Munasir Ali menjadi salah satu tim perumus yang menghasilkan keputusan tersebut. Selain keputusan tidak akan berkecimpung dalam politik praktis, namun NU juga tidak menentang organisasi maupun partai politik.

Kemudian pada Mukhtar selanjutnya, tepatnya di Cipasung tahun 1994, Munasir Ali bertindak sebagai Ketua panitia Mukhtar. Ia menjadi Ketua panitia Mukhtar tertua sepanjang sejarah Mukhtar NU, yang kemudian mampu melakukan sindiran dengan nada humornya kepada Presiden Suharto yang sudah lama menjadi Presiden RI. Berdasarkan Hasil Mukhtar, Munasir Ali diamanahi menjadi Mustasyar PBNU.

2.4 Masa Reformasi

Pasca bergelut dalam panggung politik di Parlemen era Orde Baru, Munasir Ali menginjak masa senja yang kemudian memutuskan ia lebih banyak beristirahat dari kegiatan politik maupun organisasi. Meskipun sebenarnya Munasir Ali pada tahun 1998 masih dipercaya sebagai anggota Mustasyar PBNU, namun ia lebih banyak tinggal di rumahnya Mojokerto. Pasca Presiden Suharto diturunkan, bangsa Indonesia memasuki masa transisi yang mana kemudian banyak bermunculan partai politik baru. salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi aspirasi warga *nahdlyyin* dalam politik. Munasir Ali menjadi salah satu deklarator sekaligus membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Munasir Ali dipercaya sebagai salah satu deklarator karena kiprahnya di politik selama 20 tahun dan puluhan tahun di NU, sehingga dianggap layak menjadi salah satu deklarator. Selain itu, Munasir Ali juga sebagai Mustasyar NU yang sangat dihormati oleh warga *nahdlyyin*. Pasca menjadi deklarator PKB, Munasir Ali lebih banyak menikmati masa senjanya di rumah Pekukuhan Mojokerto.

3. Kesimpulan

Munasir Ali merupakan salah satu tokoh NU yang berkiprah dalam panggung politik, khususnya di Parlemen. Kiprah politik Munasir Ali tidak lepas dari pendidikan di pesantren dan karirnya dalam Hizbullah dan militer. Pendidikan pondok pesantren membentuk karakter dan kepribadiannya. Kemudian ditambah ketika Munasir Ali menjadi Komandan Hizbullah mampu membentuk jiwa kepemimpinannya, yang kemudian menjadi Komandan Batalyon Condromowo atau kemudian dikenal dengan Batalyon 39 Brawijaya

Pasca pensiun dari militer tahun 1958, Munasir Ali tertarik pada perjuangan politik. Dorongan tersebut kemudian Munasir Ali ditarik menjadi anggota Dewan Nasional tahun 1958 dan Dewan Perancang Pembangunan Nasional 1959. Karir politiknya semakin terbuka ketika awal Orde Baru, Munasir Ali ditarik menjadi anggota DPRGR tambahan tahun 1967-1971. Hal itu kemudian berlanjut ketika Munasir Ali menjadi anggota DPR sampai tahun 1987. Selama menjadi anggota Parlemen, Munasir Ali secara kolektif banyak menyumbangkan pikiran dan gagasannya dalam setiap kebijakan maupun gerakan yang dilakukan DPR atas kebijakan Pemerintah maupun permasalahan bangsa. Setiap pergerakan Munasir Ali tidak lepas dari pengaruh pengetahuan politik dari pesantren, yang kemudian ditambah dengan pengalamannya dalam militer yang menuntut sikap tegas dan berani dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal itulah kemudian yang diimplementasikan Munasir Ali dalam setiap sikap politiknya.

Sementara selain berkiprah dalam parlemen, Munasir Ali juga aktif di NU. Ia menjadi Pengurus Besar Pertanu sampai tahun 1973, yang kemudian melebur menjadi HKTI dengan organisasi tani lainnya. Munasir Ali juga menjadi salah satu tokoh yang membentuk HKTI, sekaligus menjadi Ketua 1 HKTI.

Kemudian dalam struktural NU, Munasir Ali diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal PBNU tahun 1979-1984, Mustasyar PBNU tahun 1984-1989, Rois Syuriah tahun 1989-1994, dan Mustasyar tahun 1994-1999. Selama menjadi pengurus NU, ia banyak melakukan terobosan terutama yang berkaitan dengan kesekretariatan dan keorganisasian sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. ia juga menjadi salah satu tim perumus pemulihan Khittah NU pada Muktamar di Yogyakarta tahun 1989.

*Dari Militer ke Panggung Politik:
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998
(Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)*

Berdasarkan rekam jejaknya juga di NU, Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam NU dan salah satu tokoh kiai sepuh NU. Hal itu kemudian menjadikan Munasir Ali dipercaya sebagai salah satu deklarator sekaligus salah satu tokoh yang ikut membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa tahun 1998.

Daftar Pustaka

- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang. 2003.
- Fealy, Greg dan Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS. 1997.
- Gosttschalk, Louis. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press , 1985.
- Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: PT. Grasindo, 1993.
- Latif, Hasyim. *Laskar Hizbullah: Berjuang Menegakkan Negara RI*, Jakarta: LTN PBNU, 1995.
- Sumardi, Siti. *Sejarah Indonesia Kontemporer*, Jember: Jember University Press, 2010.
- “Anggota-anggota Dewan Perantjang Nasional” dalam *Duta Masyarakat*, 31 Djuli 1959.